

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah utama pembangunan yang ada di Indonesia adalah masih besarnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Meskipun telah berbagai program yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, namun hal tersebut belum tertuntaskan secara optimal (Baswir, 2000: 93). Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang dimensinya pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan (Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan, 2008: 1).

Pemerintah Indonesia, ditingkat pusat dan daerah perlu untuk sampai pada sebuah pemahaman bersama bahwa bangsa Indonesia perlu membangun pemberdayaan sebagai metode pembangunan nasional. Pembangunan perlu menjadikan pemberdayaan sebagai nilai dan pilihan kebijakan, sekaligus sebagai pembelajaran sosial dalam arti kita selalu belajar bagaimana melakukan pemberdayaan semakin hari semakin baik. Karena, seperti kata cendekiawan Soedjatmoko, pembangunan tidak lain adalah belajar untuk hidup lebih baik daripada hari kemarin (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007: 10-11).

Upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, mulai tahun 2007 pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali

mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan yang melibatkan pada unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah program pemerintah untuk menanggulangi tingkat kemiskinan berbasis pada partisipasi dan pemberdayaan masyarakat (Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, 2010: 1).

Dalam PNPM Mandiri, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestarian. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia (Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, 2010: 6).

Sasaran dalam program ini adalah kecamatan-kecamatan yang dinilai paling miskin di Indonesia. Yang mana tujuan dari PNPM Mandiri adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin/pengangguran di perkotaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan (Pedoman Teknis PNPM Mandiri Perkotaan, 2012: 1).

Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan terus menerus untuk menumbuhkan kembangkan kesadaran kritis masyarakat terhadap nilai-nilai

universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan pembangunan berkelanjutan sebagai landasan yang kokoh untuk membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera (Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, 2012: 9).

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berfikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang atau masyarakat dalam rangka mencapai solusi atas permasalahan yang dihadapi (Sulistiani, 2004: 80).

Program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) ini dapat dilihat dari penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat pengangguran, kemiskinan, efisiensi, efektifitas kegiatan serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat (Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan, 2008: 1).

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri yaitu menjadikan masyarakat miskin dan pengangguran sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan

partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar Desa/Kelurahan. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih (Petunjuk teknis operasional PNPM Mandiri Perdesaan, 2008: 1).

Sasaran dari pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah kelompok miskin/pengangguran. Salah satu tempat yang mendapatkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari PNPM Mandiri Perkotaan di Pekanbaru Kecamatan Limapuluh adalah Kelurahan Rintis.

Dikelurahan ini dengan jumlah penduduk berdasarkan status pekerjaan dilihat pada tabel 1.1 di berikut ini.

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Menurut Status Pekerjaan

NO	Status Pekerjaan	Jumlah/Jiwa
1	Bekerja	2.660
2	Mencari Pekerjaan (Penganggur)	262
3	Sekolah	1.365
4	Lainnya	678
	Total	4.965

Sumber: Dokumen Kelurahan, 2011: 7

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul. **STRATEGI PNPM MANDIRI DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DI KELURAHAN RINTIS KECAMATAN LIMA PULUH PEKANBARU.**

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang menjadi alasan bagi penulis mengangkat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masalah ini sangat menarik untuk diteliti, karena masalah ini menyangkut dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan judul ini cukup relevan dengan jurusan penulis yaitu Pengembangan Masyarakat Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
2. Adanya keinginan yang kuat untuk memahami secara mendalam strategi PNPM Mandiri dalam mensejahterakan masyarakat di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru.
3. Judul ini penulis pilih atas pertimbangan dan kemampuan penulis sendiri, karena menurut penulis penelitian terjangkau baik dari waktu, tempat dan biaya (sarana dan prasarana).

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalah pahaman tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan penelitian ini, maka dipandang sangat penting penulis untuk memberikan pengertian dari pada istilah-istilah sebagai berikut:

1. Strategi

Strategi adalah penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang perusahaan, diterapkannya aksi dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Kuncoro, 2005: 1). Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Namun untuk mencapai suatu tujuan tersebut,

strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja tetapi harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya (Effendy, 2006: 9).

Kemudian menurut William J. Stanton (dalam Wilopo, 2002: 67). memperjelaskan bahwa strategi adalah sebuah rencana dasar yang luas dari suatu tindakan organisasi untuk mencapai suatu tujuan.

Strategi merupakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang kemudian dijabarkan kedalam sejumlah taktik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapula yang mengatakan bahwa strategi sebagai rencana dan memberi penjelasan atas metode yang dipakai untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan (Iriantara, 2005: 89).

2. PNPM Mandiri: gerakan nasional yang dituangkan dalam kerangka kebijakan yang menjadi acuan pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan (PNPM Mandiri P2KP, 2007: 19). Pemberdayaan yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah:

a. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan/pengangguran berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan setimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

b. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

3. Pemberdayaan

Menurut shardlow (dalam Rukminto Adi, 2001: 33) Pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.

Adapun menurut Edi Suharto istilah pemberdayaan dikelompokkan menjadi dua macam yaitu:

a. Pemberdayaan sebagai sebuah proses

Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

b. Pemberdayaaan sebagai sebuah tujuan

Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan

kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial (Suharto, 2010: 59).

Maka pemberdayaan merupakan suatu proses untuk menjadikan orang lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalah sendiri, dengan cara memberikan kepercayaan dan wewenang untuk meraih tujuan yang diinginkan sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawabnya.

4. Masyarakat

Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu *syarikat* yang berarti bersekutu. Namun kata ini tersimpul unsur pengertian yang berhubungan dengan pembentukan suatu kelompok, golongan atau kumpulan. Dan kata masyarakat lebih bermakna kepada pergaulan hidup serta hubungan manusia dan kehidupan kelompok manusia yang dalam bahasa Inggris diartikan *society* (Salam, 2007: 1-2)

Maclver dan Page (dalam Soekanto, 2007: 22) mengatakan bahwa masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Menurut Selo Soemardjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.

Auguste Comte (dalam Abdulsyani, 2007: 31) mengatakan bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri.

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

- a. Bagaimana strategi PNPM Mandiri dalam memberdayakan Masyarakat di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru.
- b. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru.
- c. Bagaimana tingkat keberhasilan PNPM Mandiri dalam memberdayakan masyarakat di Kelurahan tersebut.
- d. Apakah PNPM Mandiri sudah mampu membuat masyarakat menjadi mandiri.

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan yang timbul dan karena keterbatasan kemampuan penulis dalam penelitian ini, maka penulis membatasi masalah ini pada, “Bagaimana Strategi PNPM Mandiri dalam Memberdayakan Masyarakat di Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Pekanbaru”.

3. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi PNPM Mandiri dalam memberdayakan masyarakat di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang dicapai. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui strategi PNPM Mandiri dalam Memberdayakan Masyarakat di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Pengembangan Ilmu (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan dalam kajian ilmu-ilmu sosial lainnya yang berkaitan dengan disiplin keilmuan.

b. Bagi Penulis

Dengan hasil penelitian diharapkan dapat memenuhi persyaratan bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.i) pada jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

c. Bagi Guna Laksana (Praktis)

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan kepada jajaran pemerintah PNPM Mandiri yang diteliti oleh penulis.

F. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional

1. Kerangka Teoritis

Dalam pembahasan ini dimaksudkan untuk menjelaskan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada bab pembahasan. Adapun penelitian ini dititik beratkan pada kajian Strategi PNPM Mandiri dalam Memberdayakan Masyarakat Pengangguran Di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru.

a. Strategi

1) Pengertian Strategi

Strategi menurut Griffin dalam Tisnawati & Saefullah (2005: 132), mendefenisikan sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi, tidak hanya sekedar mencapai tujuan, akan tetapi strategi juga di maksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan dimana organisasi tersebut menjalankan aktivitas.

Strategi menurut J.L Thompson (dalam Oliver, 2006: 2) mendefenisikan strategi sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir, hasil akhir menyangkut tujuan dan sasaran organisasi. Strategi merupakan cara yang sifatnya mendasar dan fundamental yang akan di pergunakan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan dan berbagai sasarannya dengan selalu memperhitungkan kendala lingkungan yang pasti dihadapi (Sondang, 1998: 21).

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Namun untuk mencapai suatu tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja tetapi harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya (Effendy, 2006: 9).

Dengan demikian strategi merupakan pola umum yang terdiri dari tahapan untuk mencapai tujuan yang dimulai dari cara pelaksanaan dan langkah sebagai pedoman untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi dalam segala hal digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan tidak akan mudah dicapai tanpa strategi, karena pada dasarnya segala tindakan untuk pembuatan itu tidak terlepas dari strategi. Adapun tentang taktik, sebenarnya merupakan cara yang digunakan dan merupakan dari strategi (Rafi'udin & Djaliel, 1997: 77).

2) Kriteria Strategi

Agar semua perencanaan dari suatu kegiatan tercapai dengan baik, tentunya harus sesuai dengan strategi yang telah tersusun dengan baik. Oleh karena itu, perlu ditetapkan kriteria strategi dalam mencapai suatu tujuan yaitu:

- a. Strategi pemberdayaan masyarakat
- b. Strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia
- c. Strategi perlindungan sosial
- d. Strategi peningkatan kualitas lingkungan

e. Strategi perluasan kesempatan kerja dan berusaha

Oleh bahwa pilihan strategi adalah keputusan atau memilih strategi yang baik yang memenuhi tujuan perusahaan atau instansi. Keputusan yang akan diambil melibatkan pemusatan pada berbagai alternatif, pertimbangan faktor-faktor seleksi, penilaian berbagai alternatif terhadap kriteria ini, dan melakukan pemilihan yang sesungguhnya (Lauren, 1998: 28).

3) Tujuan dan Fungsi Strategi

Strategi bertujuan untuk menentukan kerangka kerja dari aktivitas bisnis perusahaan dan memberikan pedoman untuk mengoordinasikan aktivitas, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan dan mempengaruhi lingkungan yang selalu berubah. Sedangkan fungsi strategi adalah sebagai alat petunjuk, pemberian arah yang jelas tentang bagaimana teknis operasionalnya dari tujuan yang akan dicapai. Strategi sangat penting untuk menentukan kesuksesan organisasi. dengan menggunakan manajemen strategi, manajer pada semua tingkat dari suatu perusahaan dapat berinteraksi dalam menyusun perencanaan stratejik dan mengimplementasikan strategi (Kuncoro, 2005: 2).

b. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengubah suatu keadaan atau kondisi masyarakat yang standar

hidupnya rendah ke kondisi yang lebih baik dalam artian ekonomi, sosial-budaya, dan politik (Wignyosoebroto, 2005: 72).

Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Para pekerja masyarakat berupaya memfasilitasi warga dalam proses terciptanya keadilan sosial dan saling menghargai melalui program-program pembangunan secara luas yang menghubungkan seluruh komponen masyarakat. Pengembangan masyarakat adalah komitmen dalam memberdayakan lapis bawah sehingga mereka memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depannya. Masyarakat lapis bawah umumnya terdiri atas orang-orang lemah, tidak berdaya dan miskin karena tidak memiliki sumber daya atau tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol sarana produksi (Zubaedi, 2013: 4).

Pengembangan masyarakat atau pengembangan sumber daya manusia diartikan sebagai memperluas horizon pilihan bagi masyarakat banyak. Hal ini berarti bahwa masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan memakai logika ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan (Rosmita dan Aslati, 2011 : 22).

Menurut Payne (dalam Rukminto Adi, 2001 :32) mengemukakan bahwa suatu proses pemberdayaan masyarakat pada intinya ditujukan

guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui daya transfer dari lingkungannya.

2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat sebagai berikut (Wignyosoebroto, 2005: 8-9):

a) The Growth Strategy

Penerapan strategi pertumbuhan ini pada umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis, melalui peningkatan perkapita penduduk, produktivitas, pertanian, permodalan, dan kesempatan kerja yang dibarengi dengan kemampuan konsumsi masyarakat terutama diperdesaan.

b) The Welfare Strategy

Strategi kesejahteraan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, karena tidak dibarengi dengan pembangunan kultur dan budaya mandiri dalam diri masyarakat maka yang terjadi adalah sikap keberuntungan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu dalam setiap usaha pengembangan masyarakat, salah satu aspek yang harus diperhatikan penanganannya adalah masalah kultur dan budaya masyarakat.

c) The Responsitive Strategy

Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menggapai kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan dari pihak luar untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi serta sumber-sumber yang sesuai bagi kebutuhan proses pembangunan.

d) The Integrated or Holistic Strategy

Untuk mengatasi dilema pengembangan masyarakat karena “kegagalan” ketiga strategi yang dijelaskan, maka konsep kombinasi dari unsur-unsur pokok etika strategi diatas menjadi alternatif terbaik. Strategi ini secara sistematis mengintegrasikan seluruh komponen dan unsur yang diperlukan, yakni ingin mencapai secara simultan tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan masyarakat.

3. Jenis-jenis Pemberdayaan Masyarakat

Adapun jenis-jenis pemberdayaan masyarakat berdasarkan ruang lingkupnya ialah sebagai berikut (Rosmita & Aslati, 2011: 27-32):

a) Pemberdayaan secara individu

Seorang muslim harus memiliki kecerdasan ruhaniah dan kecerdasan intelektualitas, peningkatan kualitas individu melalui pendidikan dan dengan memiliki kualitas hidup yang tinggi, motif selanjutnya diarahkan agar manusia sebagai pribadi selalu bekerja

keras, penuh kesungguh-sungguhan, keahlian dan keterampilan dalam mengerjakan sesuatu sebagai manifestasi motif semangat profesionalisme, dan selalu menghargai waktu.

ada tiga dimensi dalam pemberdayaan individu yaitu:

- 1) Dimensi kepribadian sebagai manusia, yaitu kemampuan untuk menjaga integritas, termasuk sikap tingkah laku, etika dan moralitas yang sesuai dengan pandangan masyarakat.
 - 2) Dimensi produktifitas yang menyangkut apa yang dihasilkan oleh manusia tadi, dalam hal jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik.
 - 3) Dimensi kretaitas yang menyangkut kemampuan seseorang untuk berfikir dan berbuat kreatif, menciptakan sesuatu yang berguna bagi dirinya dan masyarakatnya (Hasan, 2003: 60).
- b) Pemberdayaan melalui kelompok keluarga

Keluarga merupakan bentuk masyarakat terkecil, tetapi terpenting dalam kehidupan seseorang. Keluarga adalah jiwa masyarakat yang merupakan tulang punggungnya. Jika pembinaan dan pembinaan individu-individu dalam keluarga diarahkan kepada pembinaan dan pemberdayaan yang baik dengan memiliki kecerdasan ruhaniah dan kecerdasan intelektualitas maka keluarga tersebut akan dapat mencapai keluarga yang mandiri, sejahtera dan menjadi ujung tombak dalam pembangunan.

Pemberdayaan keluarga dalam konteks islam meliputi tiga aspek pemberdayaan ruhaniah, intelektual dan ekonomi. *Pertama* pemberdayaan ruhaniah adalah berawal dari pembentukan keluarga ketika memilih pasangan suami istri, dalam hal ini islam sangat ketat dalam menetapkan syarat laki-laki atau perempuan yang boleh dinikahi. Setelah terbentuk sebuah keluarga, maka perlu arahan dan bimbingan terhadap pembentukan keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah.

Kedua pemberdayaan intelektualitas adalah dalam bentuk bimbingan dan pengajaran secara informal dalam keluarga yang dapat terbentuk pengetahuan secara koknitif ataupun dalam bentuk keterampilan (life skill).

Ketiga pemberdayaan keluarga pada ekonomi sangat erat dengan pemberdayaan ruhaniah dan intelektual karena untuk dapat meningkatkan taraf hidup dalam keluarga perlu adanya usaha peningkatan skill bagi anggota keluarga dan keterampilan berwira usaha seperti pemberian modal usaha, penyaluran zakat dan lain-lain.

c) Pemberdayaan melalui masyarakat

Manusia pada hakikatnya hidup bermasyarakat. Menurut Ibnu Khaldun bahwa manusia adalah makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri. Pemberdayaan masyarakat dalam konteks islam terdiri dari:

Pertama pemberdayaan ruhaniah yaitu memerlukan kerja keras dan keterlibatan berbagai komponen yang ada, baik melalui

pendidikan formal, non-formal ataupun informal yang berorientasi kepada pemberdayaan total ruhaniah islam, melalui dakwah islam yang sistem nilai moralitasnya dibangun diatas nilai-nilai agama.

Kedua pemberdayaan intelektual yaitu melibatkan komponen, baik pemerintah, alim ulama, da'i dan berbagai komponen lainnya dan juga media baik cetak maupun elektronik dengan materi pemahaman bidang kognitif masyarakat.

Katiga pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi. Dalam pandangan Ibnu Khaldun pemberdayaan ekonomi berdasarkan kepada hukum yang mengendalikan ekonomi yang meliputi hukum pembagian kerja, teori nilai, faktor-faktor produksi.

4. Tujuan dan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Glen (dalam Rukminto Adi, 2001: 154) bahwa tujuan utama dari pengembangan masyarakat adalah mengembangkan kemandirian masyarakat dan pada dasarnya memantapkan rasa kebersamaan sebagai suatu komunitas berdasarkan basis “ketetangaan” sebagai salah satu bentuk lokalitas kegiatan.

Sedangkan fungsi dari pemberdayaan masyarakat menurut Batten (dalam Rukminto Adi, 2001: 164-165) ialah:

a) Memungkinkan diperolehnya hasil yang lebih baik dalam keterbatasan sumber daya manusia yang ada

Pada dasarnya setiap kegiatan pengembangan masyarakat seringkali memang selalu ada keterbatasan dan, tenaga maupun

teknologi yang dimiliki pemerintah ataupun lembaga swasta. Melalui pendidikan yang diberikan oleh *community worker* serta dibukanya kesempatan pada masyarakat untuk mengorganisir kegiatan dan menggunakan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif.

b) Membantu perkembangan masyarakat

Dengan diperolehnya pengalaman belajar maka kemampuan masyarakat diharapkan akan dapat berkembang dan diikuti dengan tumbuhnya rasa percaya diri akan kemampuan mereka untuk mengatasi masalah.

c) Menumbuhkan rasa kebersamaan

Pengalaman bekerjasama diantara sesama anggota masyarakat untuk mengatasi suatu masalah bersama akan meningkatkan pengenalan diri diantara mereka, dengan diharapkan nantinya akan meningkatkan rasa kebersamaan.

d) Memunculkan banyak kesempatan untuk mendidik dan mempengaruhi masyarakat.

Meskipun *community worker* yang menggunakan pendekatan ini tidak ingin mendominasi masyarakat, mereka diharapkan dapat mendidik dan mempengaruhi masyarakat untuk berperilaku yang lebih positif. *Community worker* mendidik masyarakat melalui pertanyaan-pertanyaan yang dapat memancing masyarakat untuk berfikir logis dan menentukan solusi yang paling tepat untuk mereka pilih.

5. Kategori Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dapat dikategorikan kedalam tiga bidang yaitu:

1. Pemberdayaan Bidang Lingkungan

Pemberdayaan dalam bidang lingkungan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, maka didorong agar keputusan dan pelaksanaan kegiatan tersebut berorientasi pada upaya perlindungan dan pemeliharaan lingkungan baik lingkungan alami maupun buatan seperti perumahan layak huni, semenisasi, sumur bor, drainase dan lain-lain. Termasuk didalamnya penyediaan sarana dan prasarana yang kondusif dalam membangun solidaritas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

a) Tahap pemberdayaan bidang lingkungan

Tahap pemberdayaan bidang lingkungan terdiri dari:

1) Tahap Perencanaan

Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumber daya manusia (*human resources*), sumber daya alam (*natural resource*), dan sumber daya lainnya (*other resource*) untuk mencapai tujuan (Siswanto, 2009: 42).

Sasaran perencanaan pemberdayaan lingkungan adalah masyarakat mampu menyusun rencana pelaksanaan pembangunan

infrastruktur yang dapat menjamin terwujudnya infrastruktur yang diinginkan sesuai dengan ketentuan, kriteria/standar teknis bangunan dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta dapat bermanfaat secara berkelanjutan.

2) Tahap pelaksanaan

Yang dimaksud dengan pelaksanaan disini adalah tindakan-tindakan nyata untuk melakukan apa-apa yang telah dicantumkan dalam rencana, yaitu yang berkaitan dengan 4 W dan 1 H meliputi (Rahmadani, 2008: 71):

1. Apa yang harus dilakukan (What)
2. Dimana dilakukannya (Where)
3. Kapan melakukannya (When)
4. Siapa yang melakukan (Who)
5. Bagaimana melakukannya (How)

Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling krusial (penting) dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan dilapangan bila tidak ada kerjasama antara petugas warga masyarakat maupun kerjasama antar warga (Rukminto Adi, 2001: 175-176).

3) Tahap pengawasan

Pengawasan merupakan aktivitas untuk meyakinkan bahwa semua hal berjalan seperti seharusnya dan memonitor kinerja

organisasi. Kinerja aktual harus dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Jika terdapat deviasi signifikan, dilakukan koreksi yang dikembalikan ke jalur yang tepat. Monitoring merupakan alat untuk mengontrol. Dengan demikian, controlling melakukan koreksi terhadap pelaksanaan dan untuk mengetahui apakah tujuan dapat dicapai (Wibowo, 2007: 13-14).

4) Tahap Evaluasi

Evaluasi kinerja merupakan proses terakhir dari manajemen kinerja dimana dilakukan pengukuran dan penilaian atas rencana hasil kinerja. Ada tiga komponen manajemen kinerja yaitu *pertama* memahami dan menetapkan tujuan dan harapan, *kedua* memberikan umpan balik terus-menerus, *ketiga* menilai kinerja (Wibowo, 2007: 67).

5) Tahap pemeliharaan/pelestarian

Tahap pemeliharaan adalah serangkaian kegiatan terencana dan sistematis yang dilakukan secara rutin maupun berkala untuk menjaga agar prasarana yang telah dibangun tetap dapat berfungsi dan bermanfaat sesuai rencana. Sistem pemeliharaan/pelestarian diarahkan kepada adanya perawatan dan pengembangan berbagai sarana dan prasarana yang ada, sehingga dapat secara terus-menerus dimanfaatkan oleh masyarakat secara efektif dan efisien.

b) Strategi pemberdayaan bidang lingkungan

Menurut Jim Ife (dalam Zubaedi, 2013: 8) bahwa strategi pemberdayaan dalam bidang lingkungan ini meliputi:

1) Eco-lingkungan (Sosialisme Lingkungan)

Dalam perspektif ini, solusi yang ditawarkan untuk mengatasi krisis adalah dengan paham sosialisme (kebersamaan). Perlindungan secara memadai terhadap lingkungan dan konservasi terhadap sumber-sumber alam dapat dilakukan dengan mudah melalui kolektivitas atau kebersamaan

2) Eco-anarchisme (anarkisme lingkungan)

Menolong masyarakat yang kurang atau tidak memiliki kekuatan kontrol, dimana keputusan diambil oleh individu-individu atau sekelompok kecil masyarakat lokal. Berlawanan dengan bentuk-bentuk hierarki organisasi sosial, para penganut aliran eco-anarchisme menekankan desentralisasi, otonomi dan bentuk-bentuk organisasi lokal, berdasarkan prinsip ekologis atau ekologi sosial.

3) Eco-feminism (feminisme lingkungan)

Eco-feminism menuntut pengembangan sebuah masyarakat berdasarkan prinsip organisasi yang berbeda-beda, berupaya mengganti struktur yang penuh persaingan menjadi struktur yang menekankan kerjasama, mengganti individualisme dengan pengambilan keputusan secara kolektif, menghargai semua orang

serat tidak mendukung praktik dominasi, kontrol, penekanan, dan ekspolitas atau kelompok oleh kelompok lain.

2. Pemberdayaan Bidang Sosial

Kegiatan sosial merupakan kegiatan pengembangan masyarakat harus selalu berorientasi pada upaya membangun solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat sehingga dapat tercipta masyarakat yang efektif secara sosial sebagai pondasi yang kokoh dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi (Sulistiyani, 2004, 80).

Upaya Pemberdayaan masyarakat perlu didasari pemahaman bahwa munculnya ketidakberdayaan masyarakat akibat masyarakat tidak memiliki kekuatan (Zubaedi, 2013: 27).

a. Tahapan pemberdayaan bidang sosial

Tahap pemberdayaan bidang sosial dalam proses pelaksanaannya ialah:

1) Tahap Perencanaan

Perencanaan menurut Terry (dalam Panglaykim, 1991: 78-79) berarti memilih dan menghubungkan-hubungi kenyataan dalam

kita membayangkan dan merumuskan tindakan–tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Inti yang ditekankan dalam perencanaan dengan metode ini adalah mengajak masyarakat untuk mengungkapkan sendiri tentang potensi, daya, masalah, kebutuhan dan keinginan yang ingin mereka wujudkan. Dengan demikian perencanaan yang dibuat benar-benar mengakomodasikan problem, kebutuhan, dan cara-cara pemecahan masalah sesuai keinginan masyarakat (Zubaedi, 2013: 216).

2) Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh pekerja sosial dengan mengimplementasikan langkah-langkah pengembangan masyarakat yang telah dirancang. Para aktivitas ketika berada dalam tahap ini dituntut untuk memperhitungkan konsekuensi yang mungkin timbul sebagai akibat dari aksi yang dilakukan (Zubaedi, 2013: 86).

Tahap pelaksanaan adalah bagian terpenting dalam kegiatan sosial karena mewujudkan rencana kedalam tindakan hingga seberapa jauh tindakan menimbulkan perubahan yang diharapkan dan seberapa besar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

3) Tahap evaluasi

Tahap evaluasi menurut Kenny (dalam Zubaedi, 2013: 87) yaitu kelompok mengevaluasi apakah mereka telah berkerja,

mempelajari dan memulai perencanaan kedepan.

Evaluasi pekerjaan merupakan perbandingan pekerjaan-pekerjaan yang diklasifikasikan guna menentukan kompensasi yang pantas bagi pekerjaan-pekerjaan tersebut. Yang dimaksud kompensasi disini ialah segala sesuatu yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas kerja mereka (Gomes, 2003: 129).

b. Strategi pemberdayaan bidang sosial

Strategi yang dilakukan pada pemberdayaan bidang sosial ini meliputi (Zubaedi, 2013: 159-160):

1) Model Social Action

Model social action menekankan pada gerakan pengembangan masyarakat dilakukan secara partisipatif (collective action). Pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat merupakan upaya strategi dalam mempercepat peningkatan modal sosial masyarakat.

Dalam pendekatan pasrtisipatif ini setiap warga dari kelompok sasaran program selalu diikutsertakan dalam merencanakan, melaksanakan, menikmati, dan melestarikan program. Harapannya, pelibatan warga secara aktif dalam pengorganisasian dan pelaksanaan program bisa mewujudkan dua hasil, disatu sisi menciptakan program berjalan secara efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat serta disisi lain akan mentradisikan

semangat berdemokrasi dikalangan mereka (Cunha & Pena, 1997:1).

2) Model Sustainable

Aktivitas masyarakat dilakukan dengan memerhatikan aspek-aspek kesinambungan (Sustainable). Kesinambungan disini dimaksudkan sebagai upaya-upaya pengembangan kehidupan masyarakat yang menekankan pada intervensi modal sosial, modal manusia, modal fisik, dan modal alamiah (environment) secara sinergis dan berimbang.

Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai model pembangunan alternatif umumnya diupayakan oleh para aktivis lembaga swadaya masyarakat bersama warga dalam rangka memupuk modal sosial yang sebenarnya telah dimiliki masyarakat. Modal sosial perlu dipupuk mengingat ia menjadi salah satu faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

3. Pemberdayaan Bidang Ekonomi

Dalam bahasa arab istilah ekonomi adalah iqtishad yang artinya hemat dan penuh perhitungan. Seseorang yang hemat tentu penuh perhitungan dan mempunyai pilihan-pilihan dan menggunakan sumber daya (Mawardi, 2007: 2).

Para pakar ekonomi merumuskan tujuan kegiatan ekonomi secara terperinci yaitu bersifat individu dan sosial (masyarakat).

kecuali mereka sendiri merubahnya, untuk itu manusia harus berdaya dalam memandirikan diri mereka sendiri.

a. Tahapan Pemberdayaan Bidang Ekonomi

Pada tahap kegiatan ekonomi pinjaman bergulir terdiri dari:

1) Tahap Perencanaan

Perencanaan ekonomi bisa diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan secara sengaja oleh pemerintah untuk mengkoordinasikan segenap proses pembuatan keputusan ekonomi dalam jangka panjang, serta untuk mempengaruhi, mengarahkan dan dalam beberapa kasus tertentu juga untuk mengendalikan tingkat dan pertumbuhan variabel-variabel ekonomi pokok dari suatu negara demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya (Todaro & Smith, 2006: 3).

Menurut Dickison (dalam Jhingan, 2007: 518) bahwa perencanaan ekonomi ialah pengambilan keputusan utama ekonomi tentang apa dan berapa banyak, bagaimana, bila dan dimana akan diproduksi, serta buat siapa akan dialokasikan oleh badan pengambilan keputusan yang berwenang atas dasar pengamatan menyeluruh terhadap sistem perekonomian sebagai satu kesatuan.

2) Tahap pelaksanaan

Menurut Isbandi Rukminto Adi (dalam Rosmita & Aslati) menerangkan bahwa tahap pelaksanaan merupakan salah satu tahap yang penting dalam proses pemberdayaan masyarakat, karena

sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan dilapangan bila tidak ada kerjasama antara petugas dan warga masyarakat maupun kerjasama antar warga.

3) Tahap Pengawasan

Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan berfungsi sebagai untuk lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang diselenggarakan dalam suatu organisasi didasarkan pada suatu rencana termasuk suatu strategi yang ditetapkan sebelumnya dan untuk mencegah terjadinya deviasi dalam operasionalisasi suatu rencana sehingga berbagai kegiatan operasional yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik (Siagian, 2003: 258-259).

4) Tahap evaluasi

Evaluasi didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan secara sadar sistematis untuk membandingkan hasil yang nyatanya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai dikaitkan dengan tujuan, sasaran, dan rencana, dalam hal ini termasuk strategi sebagai proses perencanaan setelah suatu tahap tertentu dalam proses operasional dilalui (Siagian, 2003: 258).

Evaluasi yang dilakukan oleh pekerja sosial secara terus-menerus baik secara formal atau semi formal pada akhir proses pengembangan masyarakat maupun secara informal dalam setiap bulan, mingguan dan bahkan harian (Zubaedi, 2013: 86)

b. Strategi pemberdayaan bidang ekonomi

Strategi yang dilaksanakan dalam pemberdayaan bidang ekonomi ialah:

1. Memberikan kemampuan secara dasar sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan, dalam memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi kelompok-kelompok masyarakat.
2. Memberikan suatu kapasitas dan dapat menggerakkan berlangsungnya roda perekonomian.
3. Dengan adanya upaya pemberdayaan dapat mewujudkan pembangunan masyarakat yang menekankan pada unsur manusia sebagai subjek pembangunan.
4. Dengan adanya proses perubahan sosial, maka dapat memberikan pengaruh yang lebih besar memungkinkan orang-orang baik secara lokal maupun nasional.
5. Dengan adanya pemberdayaan maka dapat memberi kekuatan kepada masyarakat lemah.

b. Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan konsep yang digunakan untuk memberikan batasan masalah terhadap kerangka teoritis agar tidak terjadi

salah pengertian terhadap kerangka teoritis dan agar tidak salah pengertian terhadap pemahaman penelitian.

Dalam konsep operasional ini penulis akan memaparkan indikator strategi PNPM Mandiri yaitu:

1. Pemberdayaan Bidang Lingkungan

- a. Strategi perencanaan
- b. Strategi pelaksanaan
- c. Strategi pelestarian
- d. Strategi pengawasan
- e. Strategi evaluasi

2. Pemberdayaan Bidang Sosial

- a. Strategi perencanaan
- b. Strategi pelaksanaan
- c. Strategi pelestarian
- d. Strategi pengawasan
- e. Strategi evaluasi

3. Pemberdayaan Bidang Ekonomi

- a. Strategi perencanaan
- b. Strategi pelaksanaan
- c. Strategi pelestarian
- d. Strategi pengawasan
- e. Strategi evaluasi

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Sedangkan objek dalam penelitian ini ialah strategi PNPM Mandiri dalam Memberdayakan Masyarakat di Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Pekanbaru.

3. Sumber Data (Informan)

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Teknik sampling yang digunakan ialah *key person* yaitu digunakan apabila peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian (Bungin, 2008: 76-77). Jadi informan dalam penelitian ini ialah:

a. Informan Penelitian

1) 6 orang fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan meliputi:

a) Ketua fasilitator 1 orang

b) Fasilitator Teknik/lingkungan 2 orang

- c) Fasilitator Sosial 1 orang
- d) Fasilitator ekonomi 2 orang
- 2) Lembaga Keswadayaan Masyarakat sebanyak 19 orang
- 3) Kelompok Swadaya Masyarakat sebanyak 25 orang
- b. Informan Sekunder (Pendukung)
 - 1) 1 orang kepala kecamatan
 - 2) 1 orang kepala kelurahan
 - 3) 8 orang ketua RW
 - 4) 29 Orang ketua RT

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu dengan mengamati secara langsung lapangan untuk memperoleh informasi tentang strategi PNPM Mandiri dalam memberdayakan masyarakat di Kelurahan Rintis Kecamatan Lima Puluh Pekanbaru.
- b. Dokumentasi, yaitu data yang diambil di kantor PNPM Mandiri.
- c. Wawancara, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden dengan masalah yang berkaitan.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Metodologi kualitatif menurut Taylor dan Bogdan dapat diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati

(Moleong, 1996: 3). deskriptif ialah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, bukan angka-angka (Moleong, 1996: 6)

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan analisi data deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan, mengklarifikasikan dan menganalisis data yang berkaitan dengan objek penelitian untuk selanjutnya diambil suatu kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam menelaah serta memahami penelitian ini, maka penulis menyusun laporan penelitian ini dalam 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konsep operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN LOKASI

Terdiri dari sejarah Kelurahan Rintis, letak geografis, kehidupan masyarakat, dan proses pelaksanaan pemberdayaan.

BAB III : PENYAJIAN DATA

Berisi tentang strategi PNPM Mandiri dalam memberdayakan masyarakat di Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Pekanbaru.

BAB IV : ANALISA DATA

Berisi tentang strategi PNPM Mandiri dalam memberdayakan masyarakat di Kelurahan Rintis Kecamatan Limapuluh Pekanbaru.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran